

Abstrak

Pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk wajib pajak orang pribadi dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi perpajakan. Kebijakan ini diharapkan dapat menyederhanakan proses administrasi, mempercepat validasi identitas, dan mengurangi tumpang tindih data antara lembaga kependudukan dan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi (OP) di KPP Pratama Semarang Candisari dan menemukan faktor-faktor penghambat dalam implementasi pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi (OP) di KPP Pratama Semarang Candisari serta mengetahui bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analisis. Data diperoleh melalui teknik wawancara terstruktur dengan pejabat di KPP Pratama Semarang Candisari sebagai data primer sedangkan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sebagai data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemadanan antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi (OP) di KPP Pratama Semarang Candisari menunjukkan peningkatan signifikan dalam akurasi dan efisiensi administrasi perpajakan, berkat sinergi lintas instansi dan dukungan regulasi seperti UU KUP, UU Harmonisasi Perpajakan, serta Peraturan Presiden yang mengurangi duplikasi data dan memperkuat verifikasi identitas wajib pajak. Namun, meskipun sistem informasi terintegrasi ini telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pelayanan dan kepatuhan wajib pajak, masih terdapat kendala teknis seperti perbedaan format data, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta masalah infrastruktur, koordinasi antar lembaga, dan keamanan serta privasi data yang menghambat validasi dan sinkronisasi data secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor, terutama dalam penyelarasan format data dan peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan intensif serta meningkatkan investasi pada infrastruktur teknologi informasi dan melakukan pembaruan sistem agar mendukung integrasi data secara lebih optimal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan implementasi pemadanan data dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara.

Kata Kunci: NIK, NPWP, Pajak Orang Pribadi, Pemadanan

Abstract

The government has implemented a policy to integrate the Population Identification Number (NIK) as the Taxpayer Identification Number (NPWP) for individual taxpayers in an effort to improve the effectiveness and efficiency of tax administration. This policy is expected to simplify administrative processes, accelerate identity validation, and reduce data overlap between population and tax authorities. This study aims to describe the implementation of the integration of the Population Identification Number (NIK) as the Taxpayer Identification Number (NPWP) for individual taxpayers at the Semarang Candisari Primary Tax Office (KPP Pratama Semarang Candisari), identify the inhibiting factors in the implementation process, and understand the efforts made to overcome these obstacles.

The research method used is empirical juridical with a descriptive-analytical approach. Data was obtained through structured interviews with officials at KPP Pratama Semarang Candisari as primary data, and through literature studies as secondary data. The data analysis method used in this study is qualitative analysis.

The results show that the implementation of the integration of the Population Identification Number (NIK) as the Taxpayer Identification Number (NPWP) for individual taxpayers at KPP Pratama Semarang Candisari has led to significant improvements in the accuracy and efficiency of tax administration. This success is attributed to cross-agency synergy and regulatory support, such as the General Provisions and Tax Procedures Law (UU KUP), the Law on Tax Harmonization, and Presidential Regulations, which have helped reduce data duplication and strengthen taxpayer identity verification. However, despite the positive contributions of this integrated information system to improving taxpayer services and compliance, several technical challenges remain. These include inconsistencies in data formats, limited human resource capacity, infrastructure issues, inter-agency coordination problems, and concerns regarding data security and privacy, all of which hinder optimal data validation and synchronization. Therefore, this study recommends enhancing cross-sectoral coordination, particularly in aligning data formats and improving human resources through intensive training. It also suggests increasing investment in information technology infrastructure and updating existing systems to better support data integration. With these measures, the implementation of data integration is expected to become more effective and contribute to increased state revenue.

Keywords: NIK, NPWP, Personal Tax, Matching.